

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PAMBAHASAN

A. Gambaran Wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta

Berdasarkan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Angka 2017, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan salah satu provinsi dari 33 provinsi di wilayah Indonesia yang terletak di pulau Jawa bagian tengah. DIY pada bagian selatan dibatasi oleh Lautan Indonesia, sementara pada bagian timur laut, tenggara, barat laut dibatasi oleh wilayah provinsi Jawa Tengah yang meliputi kabupaten Klaten di sebelah timur laut, kabupaten Wonogiri di sebelah tenggara, kabupaten Purworejo di sebelah barat, kabupaten Magelang di sebelah barat laut. Selain itu, DIY terletak antara 7,33 hingga 8,12 Lintang Selatan dan 110,00 hingga 110,50 Bujur Timur.

Selain itu, DIY ini terbagi dalam 4 kabupaten dan 1 kota yang terdiri dari kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul serta kota Yogyakarta. Pusat pemerintah terletak pada kota Yogyakarta. Luas wilayah kota Yogyakarta sebesar 32,5 km² atau 1,02 persen dari wilayah DIY yang berarti kota Yogyakarta memiliki luas terkecil. Sedangkan daerah yang wilayahnya terluas berada di Gunungkidul yaitu sebesar 1.485,4 km² atau 46,6 persen luas dari DIY.

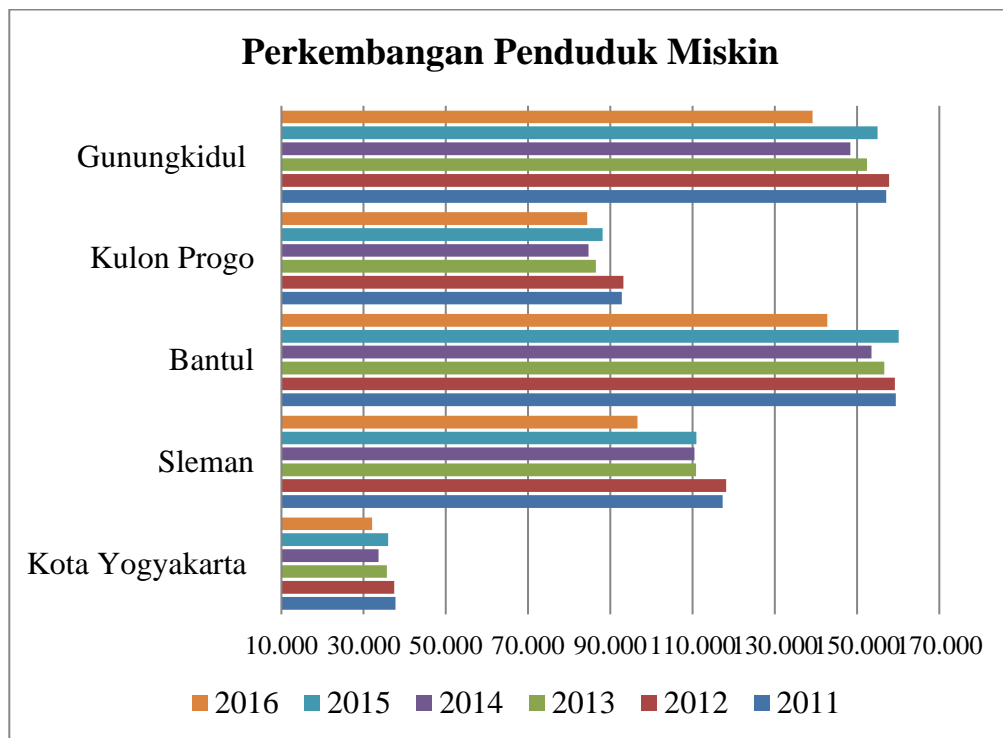
Walaupun luas wilayah di kota Yogyakarta terkecil akan tetapi pada tahun 2015 kepadatan penduduk termasuk tertinggi yaitu sebesar 12.699 jiwa per km². Dan sebaliknya kabupaten Gunungkidul yang memiliki luas wilayah tertinggi tetapi mempunyai kepadatan terendah yaitu sebesar 482 jiwa per km². Kepadatan penduduk di kabupaten Sleman 2.031 jiwa per km². Sementara itu kepadatan penduduk di kabupaten Bantul sebesar 1.917 jiwa per km² dan kabupaten Kulon Progo sebesar 703 jiwa per km².

B. Studi Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, Upah Minimum dan Inflasi dengan Tinjauan Kemiskinan di DIY

Studi ini dilakukan untuk mengetahui apakah pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, upah minimum dan inflasi berpengaruh secara parsial atau individual terhadap tingkat kemiskinan di DIY. Terlebih dahulu peneliti akan menjelaskan mengenai data yang akan diuji. Berikut ini adalah data masing-masing akan dilakukan uji data panel.

1. Kemiskinan

Jumlah penduduk di kabupaten dan kota DIY yang berada di bawah garis kemiskinan semakin berkurang. Hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan di wilayah tersebut. Berikut ini adalah perkembangan penduduk miskin kabupaten/kota di DIY pada tahun 2011-2016.



Sumber: BPS Yogyakarta

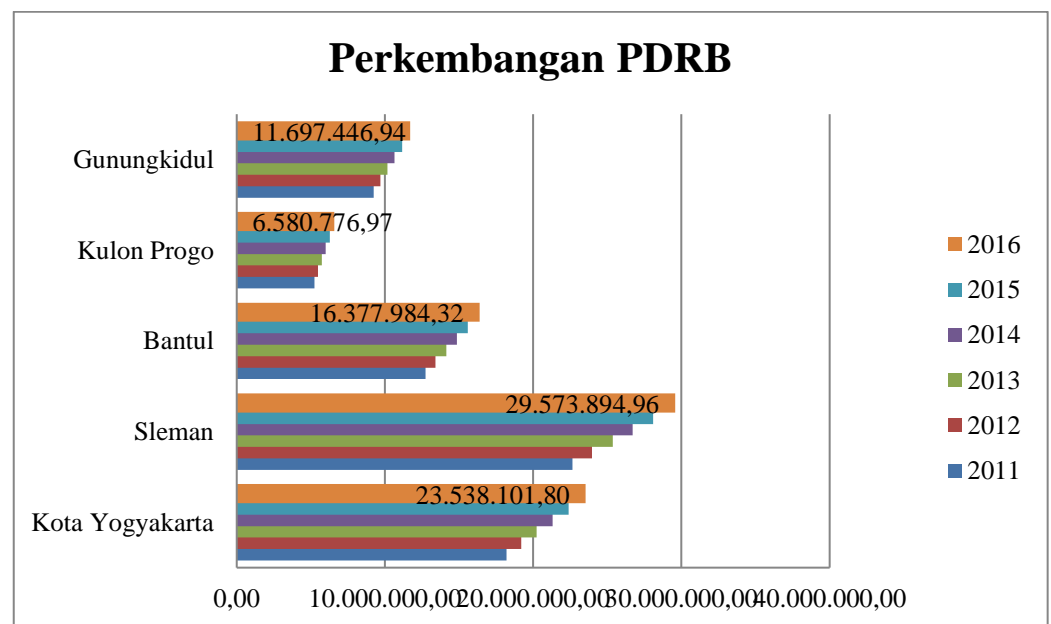
Gambar 4. 1 Perkembangan Penduduk Miskin di DIY tahun 2011-2016

Berdasarkan gambar 4.1 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin pada kabupaten/kota di DIY mengalami penurunan pada setiap tahunnya, tetapi pada tahun 2015 mengalami kenaikan jumlah setiap kabupaten/kota. Kenaikan tersebut karena adanya kenaikan harga BBM sehingga berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Pada tahun 2016 jumlah penduduk miskin tertinggi berada di kabupaten Bantul yaitu sebesar 142.760 jiwa, sedangkan yang terendah berada di kota Yogyakarta yaitu sebesar 32.060 jiwa. Jumlah penduduk miskin tertinggi kedua berada pada kabupaten Gunungkidul yaitu sebesar 139.150 jiwa. Selanjutnya kabupaten Sleman sebesar 96.630 jiwa dan yang terakhir adalah kabupaten Kulon Progo yaitu sebesar 84.340

jiwa. Jika jumlah penduduk miskin tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015 maka jumlah penduduk miskin pada tahun 2016 mengalami penurunan.

2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat ditunjukkan dengan adanya kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Kenaikan PDRB pada kabupaten dan kota di DIY setiap tahun tentunya menunjukkan bahwa perekonomian di DIY ke arah positif. Berikut ini adalah tabel PDRB atas dasar harga konstan 2010 di kabupaten/kota di DIY.



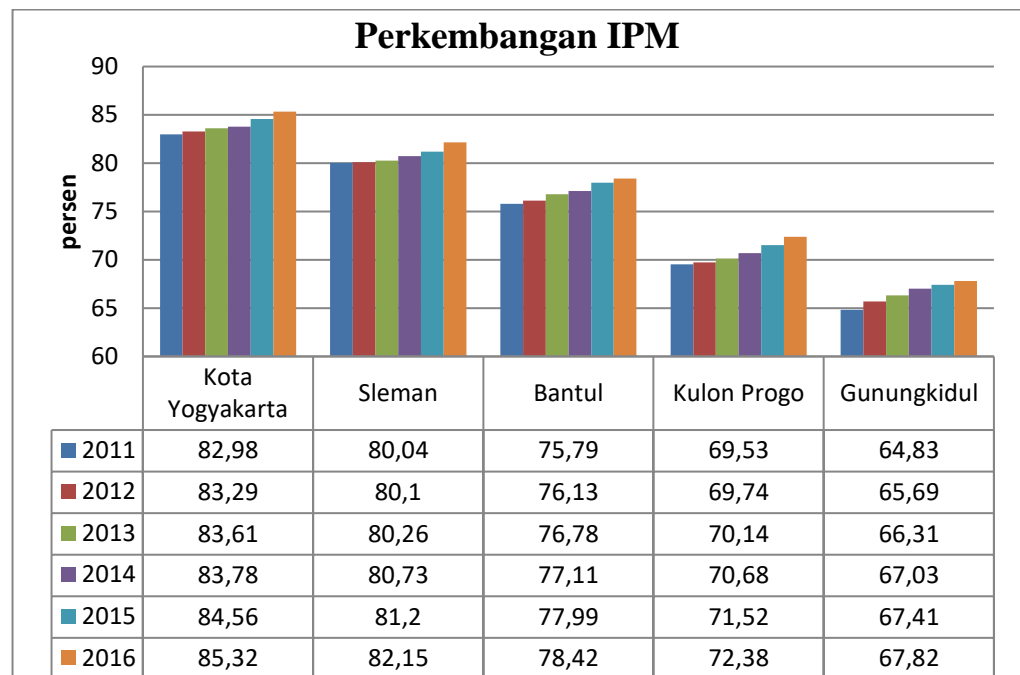
Sumber: BPS Yogyakarta

Gambar 4. 2 Perkembangan Atas Harga Konstan di DIY tahun 2011-2016 (juta rupiah)

Berdasarkan gambar 4.2 diatas menunjukkan bahwa setiap kabupaten/kota mengalami laju pertumbuhan PDRB mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal tersebut dapat dilihat dari pertumbuhan PDRB setiap kabupaten dan kota di DIY. Laju pertumbuhan PDRB yang tertinggi pada tahun 2016 yaitu di kota Yogyakarta sebesar 23.538.101,80 juta rupiah. Sementara PDRB yang terendah yaitu kabupaten Kulon Progo sebesar 6.580.776,7 juta rupiah. Sementara itu, PDRB kabupaten Sleman sebesar 29.573.894,96 juta rupiah. PDRB kabupaten bantul sebesar 16.377.984,32 juta rupiah. Sementara itu, PDRB kabupaten Gunungkidul sebesar 11.697.446,94 juta rupiah.

3. Indeks Pembangunan Manusia

Dengan melihat indeks pembangunan manusia atau ipm pada suatu daerah maka akan menunjukkan kualitas manusia dalam wialyah tersebut. IPM ini dilihat dari 3 konsep yaitu harapan hidup, pendidikan dan daya beli. Berikut ini adalah grafik IPM di kabupaten dan kota DIY.



Sumber: BPS Yogyakarta

Gambar 4. 3 Perkembangan IPM di DIY tahun 2011-2016

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa IPM satu daerah dengan daerah lain tidak merata. Tetapi IPM pada setiap kabupaten/kota mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2016 IPM yang mempunyai nilai tertinggi terdapat pada kota Yogyakarta yaitu sebesar 85,32 persen. Sedangkan nilai IPM yang terendah terdapat pada kabupaten Gunungkidul yaitu sebesar 67,82 persen.

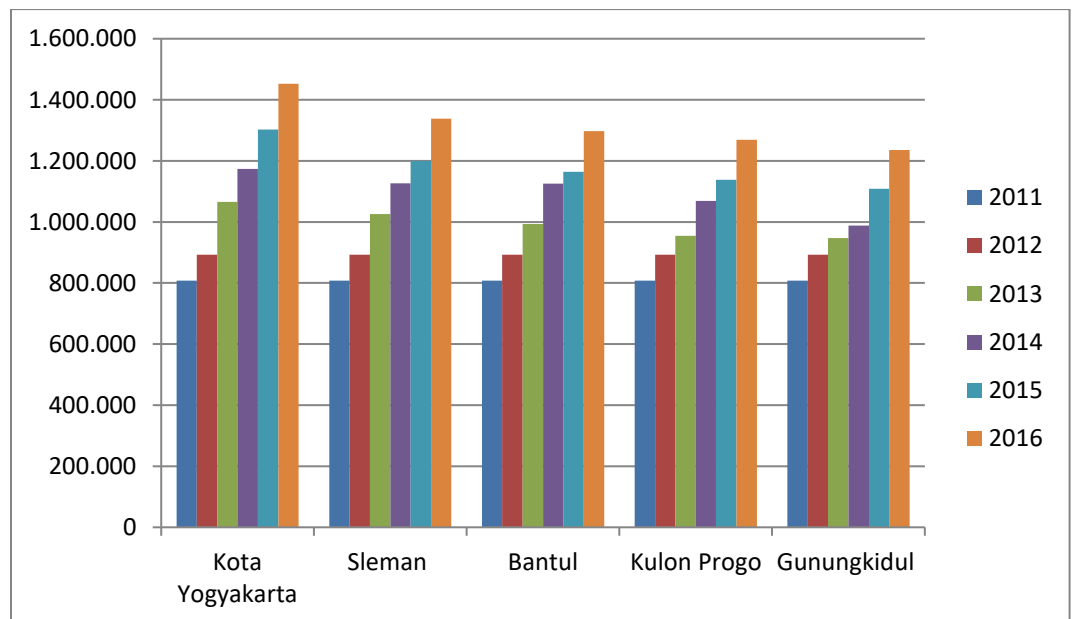
Sementara itu, IPM tertinggi kedua yaitu pada kabupaten Sleman yang pada tahun 2016 sebesar 82,15. IPM yang ketiga yaitu kabupaten Bantul yang pada tahun 2016 sebesar 78,42 persen. Selanjutnya yaitu kabupaten Kulon Progo yang pada tahun 2016 yaitu

sebesar 72,38 persen. Pencapaian IPM kota Yogyakarta dan kabupaten Sleman termasuk dalam IPM sangat tinggi karena lebih dari 80 persen.

4. Upah Minimum

Upah minimum merupakan upah yang harus dibayarkan secara per bulan oleh perusahaan kepada karyawan atau buruh. Upah minimum sendiri terdiri dari dua yaitu Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Provinsi (UMP). Berikut ini adalah upah minimum kabupaten/kota di DIY tahun 2011-2016.

Sumber : Disnakertrans DIY



Sumber : Disnakertrans DIY

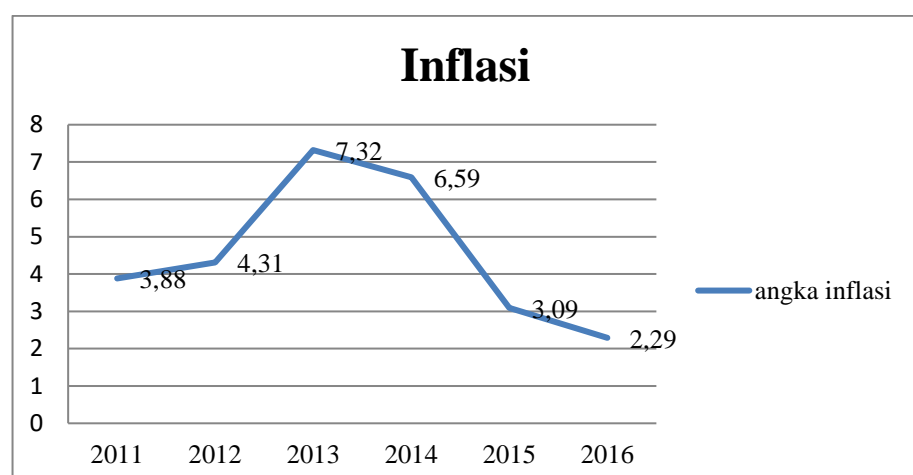
Gambar 4. 4 Perkembangan Upah Minimum di DIY tahun 2011-2016

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa perkembangan upah minimum pada setiap kabupaten/kota di DIY mengalami kenaikan setiap tahunnya dengan diiringi meningkatnya harga barang

dan jasa. Upah minimum tertinggi pada tahun 2016 berada di kota Yogyakarta sebesar 1.452.400 rupiah sedangkan yang terendah berada di kabupaten Gunungkidul sebesar 1.235.700 rupiah. Sementara itu kabupaten Sleman sebesar 1.338.000 rupiah, kabupaten Bantul sebesar 1.268.870 rupiah dan kabupaten Kulon Progo sebesar 1.268.870 rupiah.

5. Inflasi

Stabilitas ekonomi pada perekonomian di DIY dapat dilihat dari perkembangan Inflasi di daerah tersebut. Semakin tinggi Inflasi yaitu lebih dari 10 persen maka mengindikasikan bahwa perekonomian yang terjadi di daerah tersebut berada pada keadaan yang tidak stabil. Apabila laju inflasi kurang dari 10 persen maka keadaan perekonomian di daerah tersebut dapat dikatakan stabil. Berikut ini adalah laju Inflasi di DIY pada tahun 2011 sampai dengan 2016.



Sumber: Bank Indonesia

Gambar 4. 5 Perkembangan Laju Inflasi di DIY tahun 2011-2016

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa inflasi di DIY selama 5 tahun terakhir mengalami fluktuatif. Walaupun fluktuatif tetapi masih dalam keadaan inflasi ringan karena dibawah 10 persen. Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 7.32 persen. Kenaikan tersebut dikarenakan adanya kenaikan harga bbm dan harga komoditas lainnya seperti sayuran di pasaran. Pada tahun berikutnya inflasi di DIY mengalami penurunan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa inflasi DIY berada dalam kondisi harga komoditas stabil atau dalam inflasi yang ringan.

C. Analisis Data Kemiskinan di DIY

Dalam penelitian ini dilakukan uji regresi yaitu data panel. Tujuan dari pengujian regresi ini untuk memperkuat hasil analisis dan juga teori-teori yang sudah ada. Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah Pertumbuhan Ekonomi (PE), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Upah Minimum (UM) dan Inflasi. Adapun tahap-tahap melakukan uji regresi yaitu menentukan model regresi data panel, lalu tahap kedua yaitu menentukan model regresi mana yang sesuai untuk digunakan dengan cara melakukan uji pemilihan model, tahap ketiga yaitu melakukan uji asumsi klasik dan tahap terakhir melakukan uji hipotesis. Selanjutnya akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Uji *Chow*

Pengujian pada uji *chow* data panel diestimasi dengan menggunakan pendekatan model *fixed effect*. Uji *chow* ini dilakukan untuk mengetahui apakah *commont effect* atau *fixed effect* yang sesuai dalam mengestimasi data panel. Berikut ini adalah hasil dari uji *chow*.

Tabel 4. 1

Uji *Chow*

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	0.000000	(4,21)	1.0000
Cross-section Chi-square	0.000000	4	1.0000

Berdasarkan uji *chow* diatas menunjukkan bahwa nilai dari *prob. Cross-section F* dan *prob. Cross-section chi-square* yaitu sebesar 1.000 lebih besar dari nilai alpha sebesar 0.05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa menurut uji *chow*, estimasi data panel yang sesuai adalah *commont effect* dibandingkan menggunakan *fixed effect*. Selanjutnya akan dilakukan uji *Hausman*.

2. Uji *Hausman*

Pengujian pada uji *hausman* data panel diestimasi dengan menggunakan pendekatan model *random effect*. Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah *fixed effect* atau *random effect* yang sesuai dalam mengestimasi data panel. Berikut ini adalah hasil dari regresi uji *hausman*.

Tabel 4. 2
Uji *Hausman*

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	0.000000	4	1.0000

Berdasarkan tabel diatas, nilai dari prob. untuk *Cross-section random* sebesar 1.000 lebih besar dari nilai alpha sebesar 0,05 sehingga termasuk ke dalam hipotesis nol. Jadi menurut pengujian *hausman*, model estimasi data panel yang sesuai yaitu menggunakan pendekatan model *random effect*.

3. Uji *Lagrange Multiplier*

Pengujian pada uji *lagrange mutiplier* ini dilakukan untuk mengetahui apakah model *random effect* atau model *commont effect* yang sesuai untuk digunakan. Hasil dari uji *Lagrange Multiplier* (LM) adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 3
Uji *Lagrange Multiplier*

LM (Breusch-Pagan)	(0.0000)
Chi-Table	63.00000

Berdasarkan tabel diatas hasil dari uji LM menunjukkan bahwa nilai prob. *Breush-Pagan* (BP) yaitu sebesar 0.0000 lebih kecil dari nilai alpha 0.05. Apabila sesuai dengan hipotesis maka H0 ditolak. Sehingga model yang sesuai untuk digunakan adalah *Random Effect*.

Berdasarkan kedua uji pemilihan model regresi yaitu uji *chow* dan uji *hausman* menghasilkan regresi yang berbeda antara satu dengan yang lain. Pada uji *chow* hasil regresi yaitu model regresi yang disarankan untuk menggunakan *commont effect*. Sedangkan uji *hausman* model regresi yang disarankan untuk digunakan yaitu *random effect*. Karena perbedaan tersebut maka dilakukan uji *Lagrange Multiplier (LM)*. Uji LM ini bertujuan untuk melihat apakah *commont effect* atau *random effect* yang sebaiknya digunakan. Hasil regresi dari uji tersebut menyarankan untuk menggunakan *random effect* dalam pemilihan model regresi.

D. Hasil Pemilihan Model Regresi

Berdasarkan hasil uji pemilihan model regresi yang sesuai dengan penelitian, maka dipilih pendekatan model *random effect*. Hasil dari regresi dapat dilihat di bawah ini pada tabel 4.4.

Tabel 4. 4
Uji *Random Effect Model*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	177442.9	315488.9	0.562438	0.5788
PE	11527.85	12522.64	0.920561	0.3661
IPM	-91552.75	8726.008	-10.49194	0.0000
UM	17842.65	5897.739	3.025337	0.0057
INFLASI	-880461.5	48889.23	-18.00931	0.0000

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		0.000000	0.0000
Idiosyncratic random		288.2817	1.0000

Weighted Statistics			
R-squared	0.983416	Mean dependent var	35905.00
Adjusted R-squared	0.980762	S.D. dependent var	1904.928
S.E. of regression	264.2145	Sum squared resid	1745233.
F-statistic	370.6114	Durbin-Watson stat	2.984719
Prob(F-statistic)	0.000000		

Berikut penjelasan mengenai hasil regresi dari *common effect model* diantaranya adalah:

- a. Variabel Pertumbuhan Ekonomi mempunyai nilai koefisien sebesar 11527.85 dengan nilai *p-value* (*sig*) sebesar 0.36 lebih besar dari 0.05.
- b. Variabel Indeks Pembangunan Manusia mempunyai nilai koefisien sebesar -91552.75 dengan nilai *p-value* (*sig*) sebesar 0.00 lebih kecil dari 0.05.
- c. Variabel Upah Minimum mempunyai nilai koefisien sebesar 17842.65 dengan nilai *p-value* (*sig*) sebesar 0.0057 lebih kecil dari 0.05.

- d. Variabel Inflasi mempunyai nilai koefisien sebesar -880461.5 dengan nilai *p-value* (sig) sebesar 0.00 lebih kecil dari 0.05
- e. Nilai *Adjusted R-square* regresi ini sebesar 0.980762
- f. Nilai F-statistik sebesar 370.6114 dengan *p-value* (sig) sebesar 0.00 lebih kecil dari 0.05.

E. Uji Asumsi Klasik

Menurut Basuki (2015), uji asumsi klasik pada data panel meliputi uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Hasil regresi dari penelitian ini mengenai uji asumsi klasik yaitu sebagai berikut:

1. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang di uji terjadi kolerasi antara variabel independen (bebas). Padahal hasil regresi dalam uji asumsi klasik yang baik adalah tidak adanya kolerasi antara variabel bebas. Apabila nilai variabel yang di uji memiliki nilai lebih dari 0.9 maka terjadi multikolinearitas. Berikut adalah hasil dari uji multikolinearitas:

Tabel 4. 5
Uji Multikolinearitas

	PE	IPM	UM	Inflasi
PE	1.000000	-0.051072	0.298368	0.807760
IPM	-0.051072	1.000000	-0.284258	-0.060236
UM	0.298368	-0.284258	1.000000	0.323163
Inflasi	0.807760	-0.060236	0.323163	1.000000

Berdasarkan uji multikolinearitas pada penelitian ini maka tidak terjadi multikolinearitas. Karena hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai variabel kurang dari 0.9. Sehingga penelitian ini lolos uji tersebut.

2. Uji Heteroskedastisitas

Uji ini dilakukan agar mengetahui apakah model regresi terkena heteroskedastisitas atau tidak. Karena dengan terjadinya heteroskedastisitas maka adanya ketidaksamaan dalam varian dan residual satu pengamatan dengan pengamatan yang lain. Berikut ini adalah hasil uji heteroskedastisitas:

Tabel 4. 6
Uji Heteroskedastisitas

Heterodkedasticity Test White			
F-statistic	0.430338	Prob. F(4,25)	0.7853
Obs*R-squared	1.932559	Prob. Chi-Square(4)	0.7482
Scaled explained SS	1.148638	Prob. Chi-Square(4)	0.8865

Berdasarkan uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa nilai probabilitas $obs \cdot R\text{-squared}$ yaitu sebesar 0.7482 lebih besar dari 0.05. Sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas pada uji yang dilakukan.

F. Uji Hipotesis

Berdasarkan tahap-tahap regresi yang sudah dilakukan maka digunakannya model *commont effect* dalam penelitian ini, sehingga uji hipotesis ini dapat dilihat pada model ini yaitu sebagai berikut:

1. Uji Koefisien Determinan

Uji koefisien determinan ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar nilai koefisien determinan dalam menerangkan variabel dependen. Nilai dari koefisien determinan yaitu antara nol dan satu. Apabila nilai koefisien determinan yang dihasilkan kecil maka kemampuan variabel independen dalam menerangkan variabel dependen hanya terbatas (Ghozali, 2011: 97). Hasil dari olah data menggunakan *random effect* seperti dibawah ini:

Tabel 4. 7

Uji Koefisien Determinan

R-squared	0.983416
Adjusted R-squared	0.980762
S.E. of regression	264.2145
F-statistic	370.6114
Prob(F-statistic)	0.000000

Nilai koefisien determinan pada hasil olah data diatas yaitu sebesar 0.980762. Hal itu dapat diartikan bahwa kemampuan variabel

independen yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, Upah Minimum dan Inflasi dalam menerangkan variabel dependen yaitu Tingkat Kemiskinan sebesar 0.980762 atau 98 persen. Sisanya sebesar 2 persen dipengaruhi oleh variabel independen lain diluar model penelitian ini.

2. Uji F

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama dapat mempengaruhi variabel dependen. Berdasarkan hasil dari regresi data panel (tabel 4.7) menunjukkan bahwa nilai probabilitas dari f-statistic sebesar 0.00. Hal ini berarti nilai 0.00 lebih kecil daripada nilai alfa 0.05. Sehingga variabel independen yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, Upah Minimum dan Inflasi berpengaruh secara bersama-sama terhadap tingkat Kemiskinan.

3. Uji T

Uji T dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara individual dapat berpengaruh terhadap variabel dependen. Nilai probabilitas tidak lebih dari 0.05. Apabila lebih dari 0.05 maka dapat dikatakan tidak berpengaruh atau tidak signifikan. Di bawah ini adalah hasil dari uji T sebagai berikut:

Tabel 4. 8**Uji T**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	177442.9	315488.9	0.562438	0.5788
PE	11527.85	12522.64	0.920561	0.3661
IPM	-91552.75	8726.008	-10.49194	0.0000
UM	17842.65	5897.739	3.025337	0.0057
INFLASI	-880461.5	48889.23	-18.00931	0.0000

Berdasarkan hasil regresi diatas maka akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengaruh variabel Pertumbuhan Ekonomi terhadap tingkat Kemiskinan

Hasil regresi yang telah dilakukan pertumbuhan ekonomi mempunyai nilai probabilitas sebesar 0.3661 lebih besar dari 0.05. Sedangkan nilai koefisien sebesar 11527.85. Artinya, Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap tingkat Kemiskinan.

2. Pengaruh variabel Indeks Pembangunan Manusia terhadap tingkat Kemiskinan

Hasil regresi yang telah dilakukan indeks pembangunan manusia mempunyai nilai probabilitas sebesar 0.0000 lebih kecil dari 0.05. Sedangkan nilai koefisien sebesar -91552.75. Artinya, Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh signifikan dan negatif terhadap tingkat Kemiskinan.

3. Pengaruh variabel Upah Minimum terhadap tingkat Kemiskinan

Hasil regresi yang telah dilakukan upah minimum mempunyai nilai probabilitas sebesar 0.0057 lebih kecil dari 0.05. Sedangkan nilai koefisien sebesar 17842.65. Artinya, Upah minimum berpengaruh signifikan dan positif terhadap tingkat Kemiskinan.

4. Pengaruh variabel Inflasi terhadap tingkat Kemiskinan

Hasil regresi yang telah dilakukan inflasi mempunyai nilai probabilitas sebesar 0.0000 lebih kecil dari 0.05. Sedangkan nilai koefisien sebesar -880461.5. Artinya, Inflasi berpengaruh signifikan dan negatif terhadap tingkat Kemiskinan.

G. Pembahasan

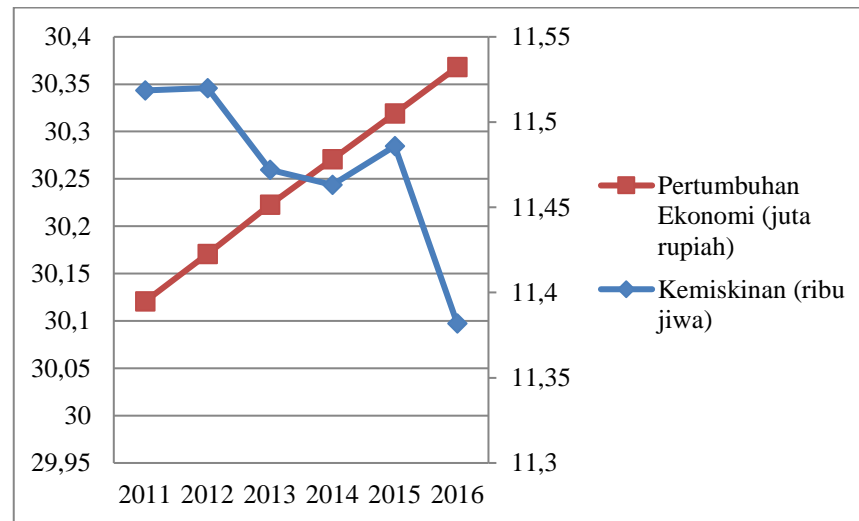
Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data panel guna mengetahui seberapa jauh variabel pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, upah minimum dan inflasi terhadap tingkat kemiskinan. Berikut ini adalah pembahasan lebih lanjut mengenai penelitian yang diteliti.

1. Variabel Pertumbuhan Ekonomi

Hasil regresi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh tidak signifikan dan positif terhadap tingkat kemiskinan di DIY pada tahun 2011 sampai dengan 2016. Artinya, pertumbuhan ekonomi di DIY belum mampu menurunkan tingkat kemiskinan di wilayah tersebut. Hal tersebut

dikatakan tidak signifikan dibuktikan dengan nilai probabilitas pada pertumbuhan ekonomi sebesar 0.3661 lebih besar dari nilai alpha sebesar 0.05. Sedangkan dikatakan positif karena nilai koefisien pada pertumbuhan ekonomi di DIY yaitu sebesar 11527.85. Setiap kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 1 satuan maka dapat meningkatkan penduduk miskin sebesar 11527.85 satuan jika IPM, upah minimum dan Inflasi dianggap nol. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis awal yaitu pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan negatif terhadap tingkat kemiskinan. Penelitian ini juga tidak sesuai dengan penelitian terdahulu oleh Windra, Pan Budi Marwoto dan Yudi Rafani (2016) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kemiskinan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya kenaikan pertumbuhan ekonomi tidak mempengaruhi berkurangnya jumlah penduduk miskin. Hal tersebut juga dapat dilihat dari gambar 4.6. Berikut adalah grafik pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di DIY.



Gambar 4. 6 Grafik Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan

Berdasarkan gambar 4.6 tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sedangkan jumlah penduduk miskin setiap tahunnya mengalami fluktuatif. Pada tahun 2012 pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan tetapi jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan. Hal tersebut juga terjadi di tahun 2015. Dengan demikian adanya pertumbuhan ekonomi belum tentu mempengaruhi menurunnya jumlah penduduk miskin.

Alasan yang mendasari bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap tingkat kemiskinan karena tidak meratanya pertumbuhan ekonomi pada kabupaten dan kota di DIY. Hal tersebut sesuai dengan data pertumbuhan ekonomi pada setiap kabupaten dan kota di DIY yang dapat dilihat di tabel 4.2. Pertumbuhan ekonomi tertinggi berada di kota Yogyakarta yang mempunyai infrastruktur yang lebih baik daripada kabupaten lainnya.

Selain itu, adanya hotel-hotel dan mall yang mendorong tersedianya lapangan kerja. Sedangkan pertumbuhan ekonomi terendah berada di kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul. Karena infrastuktur di kabupaten tersebut masih belum memadai.

Banyaknya literatur-literatur neoklasik, menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dan distribusi sering terjadi *trade off*, dimana keduanya bergerak berlawanan. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi tetapi tidak memerhatikan distribusi pendapatan. Hal ini berakibat pada saat pertumbuhan ekonomi tinggi akan tetapi tidak diiringi dengan distribusi yang merata. Sehingga pertumbuhan ekonomi tersebut hanya dinikmati oleh kalangan tertentu saja dibandingkan dengan penduduk miskin (Beik dan Arsyianti, 2016:21). Dengan terciptanya distribusi yang adil dan merata akan berpengaruh terhadap tersedianya lapangan kerja dan tentunya akan mengurangi jumlah penduduk miskin.

Selain itu, menurut Todaro dan Smith (2003), tinggi rendahnya kemiskinan di suatu negara dipengaruhi oleh tingkat pendapatan nasional rata-rata dan lebar-sempitnya kesenjangan distribusi pendapatan. Artinya, apabila suatu negara memiliki tingkat pendapatan nasional setinggi apa pun, selama distribusi pendapatan di negara tersebut tidak merata maka akan jumlah penduduk miskin di negara tersebut tetap parah. (Todaro dan Smith, 2003: 61). Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi harus diikuti dengan distribusi pendapatan yang

merata, agar tingkat kemiskinan di suatu negara menjadi berkurang. Sehingga terciptanya kesejahteraan masyarakat, tidak hanya kalangan yang berada/kaya akan tetapi juga menyentuh kalangan bawah.

Menurut pandangan Islam dalam pembangunan ekonomi harus dilakukan secara merata, dimana konsep persaudaraan umat manusia akan berjalan secara lancar apabila dibarengi dengan adanya konsep keadilan. Keadilan yang dimaksudkan adalah keadilan ekonomi. Keadilan ekonomi ini akan terwujud apabila golongan orang kaya membayarkan harganya untuk berzakat, infaq, sedekah dan wakaf (Huda, 2015: 32).

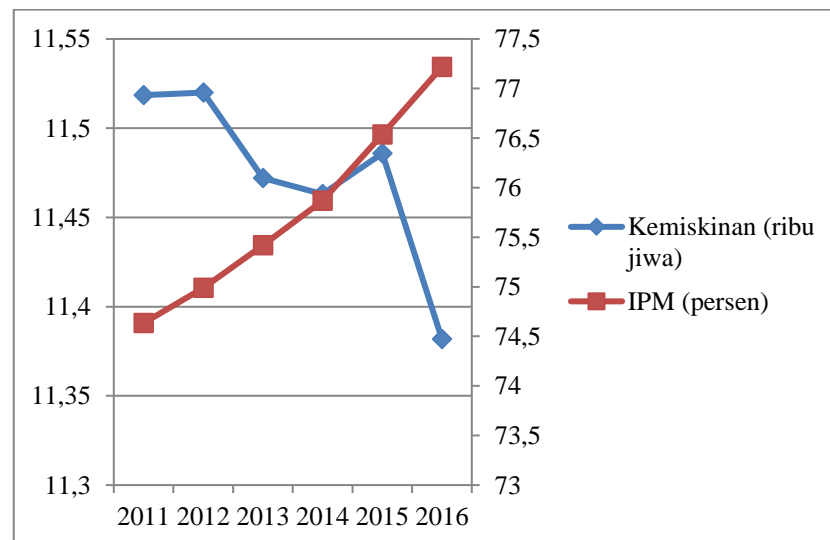
Zakat itu sendiri mempunyai tujuan untuk kesejahteraan sosial. Dengan adanya zakat maka akan membantu penduduk miskin. Penduduk yang termasuk golongan kaya akan menyisihkan uangnya untuk berzakat. Zakat yang sudah terkumpul akan dibagikan di penduduk miskin untuk membuka usaha sehingga penduduk miskin akan berkurang.

2. Variabel Indeks Pembangunan Manusia

Hasil regresi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh signifikan dan negatif terhadap tingkat kemiskinan di DIY pada tahun 2011 sampai dengan 2016. Artinya, IPM di DIY mampu menurunkan tingkat kemiskinan di wilayah tersebut. Hal tersebut dikatakan signifikan dibuktikan dengan nilai probabilitas pada IPM sebesar 0.0000 lebih

kecil dari nilai alpha sebesar 0.05. Sedangkan dikatakan negatif karena nilai koefisien pada IPM di DIY yaitu sebesar -91552.75. Setiap kenaikan IPM sebesar 1 satuan maka dapat menurunkan penduduk miskin sebesar 91552.75 satuan jika pertumbuhan ekonomi, upah minimum dan Inflasi dianggap nol. Hasil ini sesuai dengan hipotesis awal yaitu IPM berpengaruh signifikan dan negatif terhadap tingkat kemiskinan. Penelitian ini juga sesuai dengan penelitian terdahulu oleh Lavenia Kotambunan, Sutomo Wim Palar dan Richard L.H Tumilaar (2016) yang menyatakan bahwa IPM berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kemiskinan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan IPM maka akan menurunkan jumlah penduduk miskin. Hal tersebut juga dapat dilihat dari gambar 4.7. Berikut ini adalah grafik IPM dan kemiskinan di DIY.



Gambar 4. 7 Grafik IPM dan Kemiskinan

Berdasarkan gambar 4.7 IPM setiap tahunnya mengalami kenaikan. Sedangkan jumlah penduduk miskin mengalami fluktuatif.

Akan tetapi tahun 2012, 2013, 2014 dan tahun 2016 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan. Hal tersebut sejalan dengan kenaikan IPM pada tahun tersebut.

Alasan yang mendasari bahwa IPM berpengaruh signifikan dan negatif terhadap tingkat kemiskinan karena IPM pada kabupaten dan kota di DIY rata-rata memiliki IPM yang tinggi. Selain itu juga pada setiap tahunnya IPM di kabupaten dan kota di DIY mengalami peningkatan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016. Hal tersebut dapat dilihat di gambar 4.2. Dengan tingginya IPM menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia dengan komponen seperti umur panjang dan hidup sehat (harapan hidup), pengetahuan (pendidikan) dan standar hidup layak (daya beli) memiliki kualitas yang baik. Ketiga komponen tersebut mempunyai peran dalam pembangunan ekonomi yang nantinya dapat mengurangi jumlah penduduk miskin.

Dalam komponen pendidikan, semakin besar angka partisipasi sekolah menunjukkan bahwa tingkat partisipasi penduduk dalam menempuh pendidikan di sekolah semakin tinggi. Dan sebaliknya, apabila angka partisipasi sekolah rendah maka tingkat partisipasi penduduk dalam menempuh pendidikan di sekolah rendah. Sehingga dengan adanya angka partisipasi sekolah dapat menggambarkan perkembangan kualitas sumber daya manusia dalam berperan di pembangunan (Huda, 2015: 165). Selain itu, adanya upaya untuk menekan angka kematian dengan cara mencegah dan menanggulangi

penyakit serta adanya penyediaan lapangan kerja yang tentunya dapat mencukupi kebutuhan hidup secara layak.

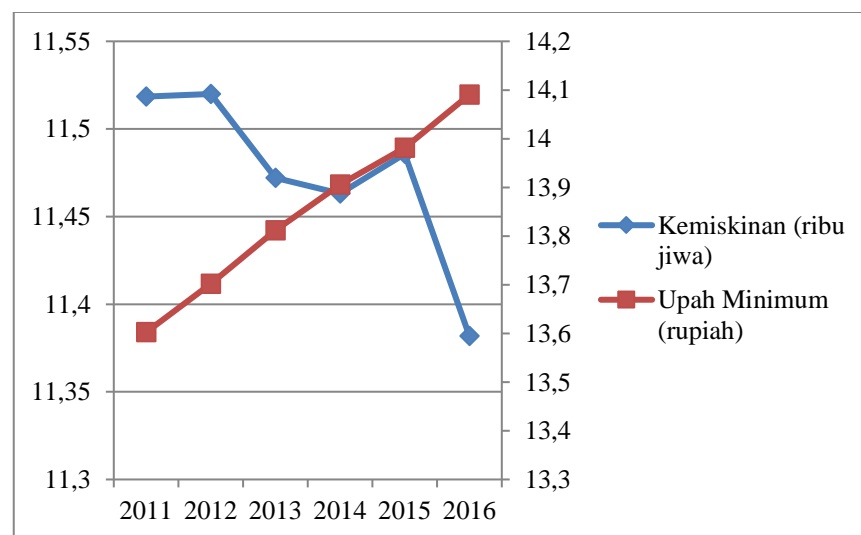
Di dalam islam menganjurkan agar mencari ilmu sebanyak-banyak akan terhindar dari kebodohan. Dengan mendapatkan ilmu tentunya seseorang akan menjadi produktif. Sehingga ketrampilan dan keahlian seseorang akan bertambah lagi. Hal tersebut berdampak pada mudahnya seseorang dalam mendapatkan pekerjaan. Artinya dengan mudahnya seseorang mendapatkan pekerjaan akan mengurangi jumlah penduduk yang masih dalam lingkaran kemiskinan. Akan tetapi dalam mencari ilmu tersebut harus memperhatikan aspek spiritual dan berorientasi pada akhirat yaitu dalam aspek akhlak dan perilakunya. Sehingga adanya keseimbangan antara dunia dan akhirat (Beik dan Arsyianti, 2016: 152).

3. Variabel Upah Minimum

Hasil regresi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa variabel upah minimum berpengaruh signifikan dan positif terhadap tingkat kemiskinan di DIY pada tahun 2011 sampai dengan 2016. Artinya, upah minimum di DIY belum mampu menurunkan tingkat kemiskinan di wilayah tersebut. Hal tersebut dikatakan signifikan dibuktikan dengan nilai probabilitas pada upah minimum sebesar 0.0057 lebih kecil dari nilai alpha sebesar 0.05. Sedangkan dikatakan positif karena nilai koefisien pada upah minimum di DIY yaitu sebesar 17842.65. Setiap kenaikan upah minimum sebesar 1 satuan maka dapat

meningkatkan penduduk miskin sebesar 17842.65 satuan jika pertumbuhan ekonomi, IPM dan Inflasi dianggap nol. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis awal yaitu upah minimum berpengaruh signifikan dan negatif terhadap tingkat kemiskinan. Penelitian ini juga tidak sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Vinny Alvionita Riva, Hainim Kadir dan Deny Setiawan (2014) yang menyatakan bahwa upah minimum berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kemiskinan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya kenaikan upah minimum maka akan menambah jumlah penduduk miskin. Hal tersebut juga dapat dilihat dari gambar 4.8. Berikut ini adalah grafik antara upah minimum dan kemiskinan di DIY.



Gambar 4. 8 Grafik Upah Minimum dan Kemiskinan

Berdasarkan gambar 4.8 menunjukkan bahwa adanya upah minimum mengalami kenaikan setiap tahunnya. Akan tetapi walaupun adanya kenaikan setiap tahunnya tidak berpengaruh terhadap

menurunnya jumlah penduduk miskin setiap tahunnya. Hal tersebut terlihat pada tahun 2012 dan 2015 yang mengalami kenaikan jumlah penduduk miskin. Padahal terjadi kenaikan upah pada tahun tersebut.

Namun, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Junita Sari dan Denny Sumantri Mangkuwinata (2017) yang menyatakan bahwa upah minimum berpengaruh signifikan dan positif terhadap kemiskinan. Alasan yang mendasari bahwa upah minimum berpengaruh signifikan dan positif terhadap tingkat kemiskinan karena sektor yang mendominasi perekonomian di DIY adalah pertanian. Sementara upah minimum kabupaten biasanya dijadikan upah minimum untuk sektor industri, sehingga adanya kenaikan upah maka tidak berpengaruh terhadap menurunnya jumlah penduduk miskin. Selain itu, walaupun kenaikan upah minimum akan menyebabkan bertambahnya jumlah penghasilan tetapi tidak memberikan dampak terhadap menurunnya jumlah penduduk miskin, apabila diikuti dengan kenaikan harga kebutuhan hidup karyawan yang diakibatkan oleh inflasi. Jika inflasi yang terjadi tinggi tentunya akan menurunkan nilai nominal dari upah karyawan dan daya beli pun akan menurun (Wirawan, 2015: 397). Akibatnya jumlah penduduk miskin akan bertambah.

Selain itu, adanya kenaikan upah akan berdampak pada bahan baku yang akan dipergunakan untuk menjadi barang jadi (hasil produksi). Kenaikan hasil produksi tetapi tidak diikuti dengan

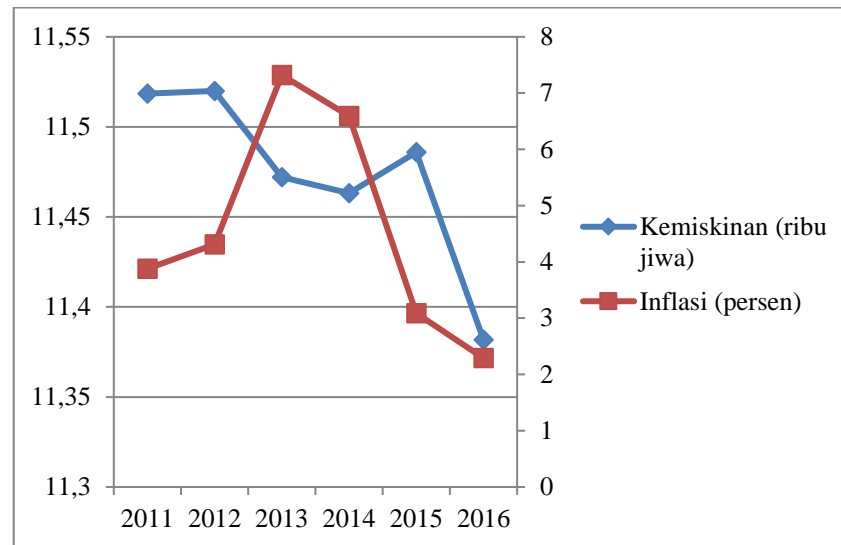
meningkatnya daya beli masyarakat akan mengakibatkan berkurangnya penghasilan atau keuntungan dari perusahaan itu sendiri. Sehingga perlu perusahaan akan mengurangi jumlah karyawannya agar operasional dalam perusahaan tetap berjalan lancar. Dengan dilakukannya pengurangan karyawan tentunya akan meningkatkan pengangguran serta jumlah penduduk miskin pun naik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa adanya kenaikan upah minimum pada suatu daerah belum tentu berpengaruh terhadap berkurangnya jumlah penduduk miskin di suatu daerah.

Menurut Islam, dalam memberikan upah kepada pekerja harus dilaksanakan secara adil dan layak. Upah yang diberikan harus sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh pekerja. Karena itu, Islam memberikan pilihan kepada pekerja untuk membatalkan kesepakatan yang telah dilakukan apabila terjadi penipuan dalam upahnya. Sebagaimana Islam menetapkan mengenai sah tidaknya dalam sistem pengupahan dengan memberikan pekerja upah yang sama rata (Al-Qarasyi, 2007: 250). Selain itu, upah dikatakan layak apabila perusahaan memberikan upah sesuai dengan standar minimum yang telah ditentukan. Sehingga tercapainya kesejahteraan para pekerja dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan demikian, penduduk miskin akan berkurang.

4. Variabel Inflasi

Hasil regresi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa variabel inflasi berpengaruh signifikan dan negatif terhadap tingkat kemiskinan di DIY pada tahun 2011 sampai dengan 2016. Hal tersebut dikatakan signifikan dibuktikan dengan nilai probabilitas pada inflasi sebesar 0.0000 lebih kecil dari nilai alpha sebesar 0.05. Sedangkan dikatakan negatif karena nilai koefisien pada inflasi di DIY yaitu sebesar -880461.5. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis awal dan teori yang ada yaitu inflasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap tingkat kemiskinan. Penelitian ini juga tidak sesuai dengan penelitian terdahulu oleh Windra, Pan Budi Marwoto dan Yudi Rafani (2016) yang menyatakan bahwa inflasi berpengaruh positif terhadap kemiskinan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya kenaikan inflasi maka akan mengurangi jumlah penduduk miskin. Hal tersebut dapat dilihat dari gambar 4.8. Berikut ini adalah grafik inflasi terhadap kemiskinan di DIY.



Gambar 4. 9 Grafik Inflasi dan Kemiskinan

Berdasarkan gambar 4.9 menunjukkan bahwa angka inflasi dan jumlah penduduk miskin mengalami fluktuatif selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2016. Adanya kenaikan inflasi pada tahun 2013 akan tetapi tidak berpengaruh terhadap naiknya jumlah penduduk miskin. Selain itu, menurunnya angka inflasi juga berpengaruh terhadap menurunnya jumlah penduduk miskin. Akan tetapi hanya pada tahun 2012 angka inflasi angka inflasi mengalami kenaikan dan diikuti dengan kenaikan jumlah penduduk miskin.

Namun, penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ummi Duwila (2016) yang menyatakan bahwa inflasi berpengaruh signifikan dan negatif terhadap tingkat kemiskinan. Salah satu, penyebabnya adalah karena inflasi termasuk ke dalam determinan makro ekonomi bagi perubahan suatu tingkat kemiskinan di sebuah negara. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi disertai dengan adanya

tingkat distribusi pendapatan yang lebih baik oleh golongan yang menerimanya maka akan meningkatkan daya beli, adanya peningkatan dalam pengeluaran jumlah konsumsi perkapita, sehingga jumlah penduduk miskin dapat berkurang atau menurun.

Selain itu, inflasi mempunyai dampak positif dan negatif terhadap perekonomian tergantung seberapa parah tingkat inflasi yang terjadi. Apabila inflasi yang terjadi termasuk inflasi yang ringan (dibawah 10 persen) maka berpengaruh positif terhadap perekonomian. Karena meningkatkan pendapatan nasional dan membuat seseorang menjadi bergairah dalam bekerja, menabung dan berinvestasi (Windra, Marwoto dan Rafani, 2016:19). Dan sebaliknya, apabila inflasi yang terjadi parah (tak terkendali) maka perekonomian akan lesu dan kacau. Tentunya akan menambah jumlah penduduk miskin.

Menurut Islam, dampak dari inflasi yang tidak dapat dikendalikan dan terjadi secara terus menerus akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan masyarakat akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Sehingga dalam Islam untuk mengendalikan Inflasi yaitu dengan cara melakukan kebijakan untuk mengatasinya baik itu secara moneter maupun fiskal. Prinsip dalam Islam memberikan peran pemerintah dalam mengatur jalannya perekonomian. Dengan diterapkannya kebijakan-kebijakan tersebut maka akan menciptakannya stabilitas ekonomi atau terkendalinya laju inflasi.